

RESPON PAKISTAN TERHADAP PENCABUTAN STATUS OTONOMI KHUSUS KASHMIR OLEH INDIA TAHUN 2019

Dwiki Yudistira Anggrianingtias¹, Etta Pasan², Frentika Wahyu³

¹ Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Surel: dwikyyp@gmail.com)

² Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

ABSTRACT (English)

In 1948 India decided to give Kashmir special autonomy status which was written in Article 370 and 35A India Constitution. In August 2019, India decided to revoke the special autonomy status of Kashmir due to frequent conflicts in the Kashmir region that the local Kashmiri official could not resolve. This policy made several countries and International Organizations respond to the policies issued by India. Pakistan is the only state actor who has responded to the actions taken by India which in increasing the escalation of the conflict and making relations between the two countries worse. The result of this research is the response issued by Pakistan, there are four. The first, Submission of a letter by Pakistan to the National Security Council (UNSC), second is the suspension of trade relations, third is the suspension of rail service and fourthly the decline in diplomatic relations.

Keywords: *Pakistan, India, Revocation, Autonomy, Kashmir.*

ABSTRAK (Bahasa)

Pada tahun 1948, India memutuskan untuk memberikan status otonomi khusus kepada Kashmir yang tertulis dalam Konstitusi India Pasal 370 dan 35A. Pada bulan Agustus 2019, India memutuskan untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir karena sering terjadi konflik di wilayah Kashmir yang tidak dapat diselesaikan oleh

pemerintah lokal Kashmir. Kebijakan ini membuat beberapa negara dan organisasi internasional memberikan tanggapannya. Pakistan adalah satu-satunya negara yang merespons dengan meningkatkan eskalasi konflik dan memperburuk hubungan kedua negara tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah respon yang diberikan Pakistan ada empat, yakni penyampaian surat oleh Pakistan kepada Dewan Keamanan PBB, Penghentian hubungan dagang, penghentian layanan kereta api dan penurunan hubungan diplomatik

Kata Kunci: Pakistan, India, Pencabutan, Otonomi, Kashmir.

INTRODUCTION

Kashmir merupakan lembah yang berada di ujung barat pegunungan Himalaya, Kashmir memiliki letak yang cukup strategis diantara negara Asia Tengah (India-Pakistan), Asia Selatan (Afganistan) dan Asia Timur (Cina) dengan luas kurang lebih 222.236 km². Karena letak dan banyaknya Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah membuat wilayah Kashmir diperebutkan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Kashmir ([Ita Mutiara Dewi, 2006](#)).

Konflik yang terjadi di Kashmir berawal karena perebutan wilayah antara Pakistan dan India. Kashmir, Pakistan dan India merupakan bekas wilayah jajahan dari Inggris dan kemudian diberi kemerdekaan serta kebebasan untuk berdiri sendiri pada tahun 1947. Kashmir juga diberi kebebasan untuk menentukan nasib mereka dengan berdiri sendiri atau bergabung bersama India atau Pakistan dengan syarat mengikuti *referendum Lord Mountbatten*, yang dimana dalam referendum tersebut pemerintah Inggris, Lord Mountbatten menyatakan bahwa

negara-negara kepangeranan (Kashmir) dapat memilih bergabung dengan Pakistan dan India tetapi harus mempertimbangkan komposisi agama, wilayah, geografis serta harapan rakyat ([Heri Kurniawan, 2013](#)).

Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, Pakistan dan India memutuskan untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara, Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947 dan disusul India yang merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Kashmir pada saat dipimpin oleh Maharaja Hari Singh beragama Hindu memutuskan untuk berdiri sendiri tanpa bergabung bersama India maupun Pakistan.

Pada Oktober 1947, terjadi pemberontakan oleh suku Pashtun di sebelah barat Kashmir terhadap Maharaja Singh. Pemberontakan tersebut terjadi karena, suku Pashtun menentang kekuasaan Maharaja Hari Singh yang selama ini mendapat dukungan oleh Inggris untuk menekan mereka. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Pakistan untuk menduduki wilayah Kashmir

dengan mengirim beberapa pasukan untuk mendukung pemberontakan tersebut (Chairul Aftah, 2005). Setelah adanya pemberontakan tersebut, Maharaja Hari Singh kemudian meminta bantuan militer kepada India. India pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Pandit Nehru, berjanji akan membantu Kashmir dengan dua syarat yaitu, Maharaja Hari Singh harus menyetujui Kashmir bergabung bersama India dan kedua, harus mendapat restu dari pimpinan Jammu dan Kashmir yang sekular dan pro untuk bergabung dengan India dengan menandatangani berkas penggabungan diri Kashmir kepada India lewat *Instrument of Accession to Indian Union* pada 26 Oktober 1947 (Herlambang Putri Utami, 2015).

Pasca bergabungnya Kashmir ke India, kerusuhan dan pemberontakan terjadi antara masyarakat Kashmir dan Pakistan kepada India. Keputusan penggabungan Kashmir ke India merupakan keputusan sepihak yang dibuat oleh Maharaja Hari Singh dengan India tanpa melibatkan masyarakat Kashmir sehingga memicu perang terbuka antara India dengan Pakistan. Perang besar antara India dan Pakistan terjadi sebanyak empat kali, diantaranya pada tahun 1947-1948, 1965, 1971 dan Perang Kargil 1999.

Pasca terjadinya beberapa perang besar tersebut, konflik antara Pakistan dan India masih sering terjadi setiap tahunnya dan hubungan kedua negara terjadi pasang surut. Pada tahun 2003 kedua negara melakukan baku tembak yang melintasi LoC. Kemudian adanya peningkatan konflik di perbatasan dimulai

pada tahun 2016 berlanjut hingga 2018 (Global Conflict Tracker, 2021). Konflik diperparah pada tahun 2019 ketika terjadinya serangan bom bunuh diri Pulwama, serangan tersebut diklaim oleh kelompok militan yang berbasis di Pakistan yaitu Jeish e-Mohammad (JeM). Karena serangan tersebut, kedua negara saling melakukan serangan udara, akibatnya rute pernebian Pakistan ditutup (cnnindonesia.com, 2019).

Pada 10 Juli 2017, terjadi penyerangan militan separatis terhadap peziarah Hindu, membuat situasi Kashmir semakin memburuk. Kepala Menteri Jammu dan Kashmir yaitu Mehbooba Mufti tidak mampu meredam kekerasan di Kashmir. Partai *Bhartiya Janata* (BJP) menuntut Mehbooba untuk menyerahkan kekuasaan Kashmir kepada presiden, yang akhirnya Mehbooba memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan Kashmir kepada Presiden India. Sebelumnya, BJP pada masa kampanye berjanji kepada masyarakatnya untuk mencabut status khusus Kashmir karena dinilai diskriminatif kepada kaum perempuan dan masyarakat diluar Kashmir. Kemunduran Mehbooba Mufti juga dimanfaatkan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi demi mewujudkan tujuan utamanya untuk melakukan rekonsiliasi nasional, membangun kepercayaan dan menciptakan perdamaian di Kashmir. Selain itu India juga ingin melakukan perubahan kebijakan luar negeri dan melakukan reformasi ekonomi (Fitri dan Takdir, 2019).

Munculnya beberapa faktor seperti konflik antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir masih sering terjadi,

sebuah janji kampanye oleh partai BJP yang menilai Pasal 370 dan 35A diskriminatif terhadap kaum perempuan Kashmir serta terhadap masyarakat diluar Kashmir dan kebijakan reformasi ekonomi oleh pemerintah India yang dianggap terhambat karena adanya ketentuan dari Pasal 370 dan 35A sehingga wilayah Kashmir tidak bisa dikontrol langsung oleh India. Akhirnya pada 5 Agustus 2019, India memutuskan untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir. Kashmir di bawah konstitusi baru selain Pasal 370 dan 35A yang tidak berlaku lagi, perubahan lainnya juga diterapkan dalam sistem administratif Jammu dan Kashmir ([The Gazette of India, 2019](#)).

Pencabutan status khusus Kashmir mendapat banyak respon dari berbagai negara dan organisasi internasional, respon yang dikeluarkan seperti menyayangkan, ketidaksetujuan serta mendukung kebijakan yang dikeluarkan India. Namun, Pakistan merupakan satu-satunya aktor yang mengeluarkan respon-respon yang berpengaruh terhadap hubungan kedua negara hingga menurunkan hubungan diplomatiknya. Respon tersebut dikeluarkan oleh Pakistan karena Pakistan berkeinginan untuk menguasai wilayah Kashmir dengan adanya kepentingan geopolitik ([DW.com, 2021](#)). Selain itu, kepentingan Pakistan untuk menurunkan citra India dimata internasional, karena selama peperangan Pakistan selalu kalah dengan India. Kesamaan etnis dan kekhawatiran terhadap muslim di Kashmir juga menjadi salah satu kepentingan Pakistan. Sedangkan, tujuan dari Pakistan yaitu demi mengembalikan hak Kashmir yang

telah dicabut, bahkan Imran Khan mengatakan siap berperang jika India tidak menarik kebijakan pencabutan tersebut ([Rosdiana, 2020](#)). Sehingga, membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana respon Pakistan terhadap kebijakan pencabutan status otonomi khusus oleh India.

LITERATURE REVIEW

Penelitian ataupun tulisan terkait Kashmir tentu sudah cukup banyak dengan beragam tema, sudut pandang permasalahan dan pendekatan teori yang digunakan, olehnya itu ada dua tinjauan yang di gunakan guna membantu menganalisa dan menyempurnakan penelitian ini, **Pertama** Tulisan Nurul Itsna Rosdiana yang berjudul Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu Oleh Pemerintah India. Penelitian Nurul berangkat dari penjelasan Kashmir yang merupakan sebuah wilayah kepemilikan ganda, dimana negara-negara yang saling klaim awalnya adalah sebuah kesatuan dari negara Hindu yang berada di Asia Selatan dalam konteks ini adalah India dan Pakistan. Pada awalnya kesatuan negara tersebut dikuasai oleh kolonial Inggris yang menguasai bidang perdagangan melalui *English East India Company* (EIC). Kondisi ini memunculkan sebuah Gerakan Kebangsaan India yang mengantarkan kemerdekaan India dan Pakistan pada tanggal 14 Agustus untuk India dan 15 Agustus untuk Pakistan di tahun yang sama yaitu 1947.

Sementara itu Kashmir yang

berada diantara kedua negara yang baru merdeka tersebut merupakan wilayah yang independen yang dipimpin oleh Maharaja Singh yang akhirnya menjadi wilayah perebutan antara kedua negara tersebut. Kashmir sebagai negara bagian dengan mayoritas Muslim, merupakan sebuah kerajaan yang pada akhir kolonial Inggris diakuisisi oleh India dengan bersamaan kerajaan Jammu.

Pada awalnya konflik mulai terjadi ketika, wilayah yang dikuasai oleh Inggris terbagi menjadi dua, yaitu India dan Pakistan. Kashmir yang pada saat itu merupakan sebuah wilayah perbatasan pun ikut terbagi menjadi dua yakni wilayah Azad Kashmir dan Gilgit- Baltistan jatuh pada Pakistan sedangkan Lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh masuk otoritas India. Konflik diperparah oleh keputusan Maharaja Singh (Raja Kashmir) yang memilih untuk bergabung bersama India dikarenakan adanya kesamaan spiritual (Agama Hindu). Hal ini membuat Pakistan terlibat dalam membela rakyat Kashmir yang masyarakatnya mayoritas Muslim.

Konflik mereda setelah pemerintah India memberikan Kashmir dan Jammu sebuah otonomi khusus pada tahun 1954. Hal ini tidak terlepas dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh dewan keamanan PBB. Namunpun demikian Konflik Kashmir kerap kali terjadi meski sudah dikeluarkannya resolusi-resolusi dari dewan keamanan PBB dari tahun 1947, 1965, 1971, 1989, 2002, 2006, 2009, 2010 sampai pada akhirnya konflik kembali pecah pada

tahun 2019.

Pada tanggal 31 Oktober 2019 Pemerintah India mencabut Pasal 370 yang mengatur tentang status khusus Kashmir dan Jammu berisi tentang kebebasan negara bagian untuk memiliki wewenang-wewenang dalam mengatur pemerintahan dalam negara bagiannya sendiri, membuat aturan hukum secara mandiri, simbol negara sendiri dan menentukan bendera sendiri mendapat respon penolakan dari rakyat Kashmir.

Hal ini di respon negatif oleh Pakistan melalui PM Imran Khan yang menyatakan India tidak mematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Kashmir, serta menganggap PBB gagal, dan menyatakan siap berperang kembali jika India tidak segera menarik kebijakan tersebut.

Berbeda dengan Pakistan, India sendiri menganggap bahwa pencabutan status khusus Kashmir dan Jammu sudah sesuai dengan konstitusi dan telah mengikuti semua prosedur resmi ketika merealisasikannya, dimana Pasal 370 pada 26 Oktober 1947 atas parakarsa Konstitusi India melalui instrumen aksasi merupakan salah satu upaya melindungi orang-orang Jammu dan Kashmir serta untuk meredakan konflik dinegara bagian tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan Rasional Aktor oleh Graham T. Allison peneliti terdahulu menemukan bahwa tindakan pemerintah dalam mencabut pasal 370 didasari beberapa pertimbangan

pertama, Aspek Sosial yakni membawa kemakmuran yang merata, dengan cara pembangunan ekonomi dikawasan serta mengintegrasikannya dengan seluruh negara. Kedua, Aspek Keamanan yakni mengurangi ancaman militasi. Ketiga, Aspek *Sovereignty* sebagai bentuk diplomasi yang baik untuk menangani perselisihan wilayah dan ancaman serangan-serangan dari Pakistan, sekaligus bentuk pengukuhan territorial Kashmir sebagai kesatuan dari India.

Tinjauan yang kedua adalah **Fitri Adi Setyorini dan Takdir Ali Mukti** yang berjudul *The Revocation of Kashmir's Special Status by Narendra Modi Administration in 2019*. Tulisan ini mencoba membahas mengenai pencabutan status spesial Kashmir pada masa pemerintahan Narendra Modi tahun 2019 yang dilatarbelakangi adanya kepentingan ekonomi dengan menggunakan teori Marxisme oleh Karl Marx.

Konflik terjadi setelah India dan Pakistan mendapat kemerdekaan dari pemerintah India sejalan dengan *Referendum Louis Mountbatten*. India mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1947 dan Pakistan merdeka pada 15 Agustus 1947. Konflik Kashmir disebabkan oleh keputusan sepihak yang dibuat oleh pemimpin Kashmir Maharaja Gulab Singh untuk mengatasi konflik internal melalui *Instrument of Accession* dengan pemerintah India pada 22 Oktober 1948. Kemudian India secara diam-diam mengambil langkah politik untuk mengontrol Kashmir melalui penerapan Pasal 370 Konstitusi India

sebagai kebijakan dari majelis Konstituante India. Pasal 370 Konstitusi India memberikan Kashmir status khusus berupa kebebasan untuk memiliki bendera sendiri, konstitusi sendiri, mengatur pemerintahannya sendiri kecuali untuk urusan luar negeri, keamanan dan komunikasi. Bergabungnya Kashmir ke India diikuti dengan Pasal 370 dan 35A Konstitusi India, dianggap sebagai tindakan yang melanggar *Referendum of Mountbatten*.

Wilayah Kashmir diperebutkan oleh India dan Pakistan karena Kashmir memiliki banyak potensi. Secara geografis, Kashmir berada di wilayah India dan berbatasan langsung dengan beberapa negara besar. Sebelah utara berbatasan dengan Rusia dan Cina, bagian timur dengan Cina Sinkiang dan Tibet, barat dengan Afganistan dan Pakistan dan selatan dengan India. Sementara secara demografis, 78% masyarakat Kashmir menganut Islam. Wilayah Kashmir berlokasi di kaki pegunungan Himalaya yang memiliki lahan subur dan berpotensi besar sebagai lahan pertanian. Pertanian Kashmir menghasilkan makanan pokok, sayuran dan buah. Kashmir juga merupakan penghasil bunga terbesar di India, khususnya tulip dan *saffrons* (kunyit). Kashmir juga memiliki potensi dalam sektor minyak dan gas.

Meskipun Kashmir memiliki banyak kekayaan sumber daya, kekayaan Kashmir tersebut tidak dapat dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah India, hal tersebut dikarenakan, posisi Kashmir yang dilindungi oleh Pasal 370 Konstitusi India yang memberikan Kashmir status

khusus. Dengan otonomi tersebut, pemerintah India memberikan Mahaaja Jammu-Kashmir otoritas untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Sebagai PM India sejak 2014, Narendra Modi melakukan banyak perubahan di berbagai bidang, ia mencoba untuk memperbaiki struktur ekonomi India dan masyarakat di Kashmir melalui sebuah pertemuan dengan *People's Democratic Party* (PDP) atau Partai Masyarakat Demokrat yang dipimpin oleh Mufti Mohammad Sayeed pada Februari 2015. Dimana PDP merupakan partai yang memiliki kendali di Kashmir. Pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian koalisi antara partai BJP dan PDP melalui pembentukan '*Agenda of Alliance*', koalisi ini membawa BJP menuduki wilayah mayoritas Muslim Kashmir sebagai pencapaian pertama dalam sejarah.

Koalisi BJP dan PDP tidak bertahan lama, setelah Mufti Mohammed Sayeed pada 7 Januari 2016, posisi Menteri Jammu dan Kashmir kemudian digantikan dengan anak perempuannya, Mehbooba Mufti. Pada masa kepemimpinannya mengalami banyak perubahan stabilitas keamanan, terutama setelah kematian Burhan Wani, ketua grup separatis militan Hizbul Mujahideen yang tertembak di Kokernag Kashmir oleh kepolisian India dan Kashmir. Kejadian tersebut memicu bentrokan di markas militer India dan sekitar *Line of Control* (LoC) hubungan antara India dan Pakistan kembali memanas.

Mehbooba Mufti mundur dari

jabatan Menteri Jammu dan Kashmir dan menyerahkan kekuasaan Kashmir kepada Presiden India. Perdana Menteri India memanfaatkan kemundurannya untuk mewujudkan janji kampanyenya untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir yang ditetapkan dalam Pasal 370 dan 35A pada Konstitusi India.

Pemerintahan India, melalui Presiden India, membuat amandemen untuk Pasal 367 Konstitusi India untuk menghindari cacat hukum dalam mencabut status khusus Kashmir. Aksi ini didukung oleh Ayat I Pasal 370 Konstitusi India yang memberikan otoritas untuk memodifikasi Konstitusi India yang berkaitan dengan masalah Jammu dan Kashmir. Karena itu, Presiden India menambahkan Ayat baru dalam Pasal 367 yang terkait erat pada penafsiran Konstitusi India. Presiden India mengganti ungkapan '*Majelis Konstituante Negara*' menjadi '*Majelis Legislatif Negara Bagian*'.

Pemerintah India melalui Menteri Dalam Negeri India memberikan resolusi dari Rajya Sabha (Parlemen India) kepada Presiden India untuk mencabut status khusus Kashmir. Ini berarti bahwa posisi pada Pasal 370 dan 35A Konstitusi India telah di cabut oleh pemerintah India pada 5 Agustus 2019.

Pencabutan status khusus Kashmir dilakukan oleh pemerintah India dibarengi dengan pengiriman ribuan tentara keamanan ke Kashmir sebelum pengumuman pencabutan status khusus tersebut. Selain itu, pemerintah India mengeluarkan larangan warga asing untuk memasuki wilayah Kashmir dan segera meninggalkan daerah tersebut.

Tidak cukup sampai disitu, Pemerintah juga melarang pertemuan publik, menahan 300 politisi dan aktivis Kashmir serta penghentian telekomunikasi dan jaringan internet, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan atau kerusuhan.

Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa, pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, India membuat perubahan dalam kebijakan luar negeri dan reformasi ekonomi. Narendra Modi melakukan reformasi ekonomi dengan mengeluarkan dua kebijakan. Pertama, merubah *Look East Policy* menjadi *Act East Policy*, *The Act East Policy* adalah merubah tujuan India untuk lebih memainkan peran strategis dalam tatanan ekonomi global dan penguatan hubungan antara negara-negara Asia Pasifik. Kedua, Narendra Modi mengeluarkan “*Make In India*” kampanye ini bertujuan untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di India. Pencabutan status khusus Kashmir bertujuan untuk membawa investasi lokal dan asing untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di Kashmir. Dan hal ini terbukti berhasil, pasca pencabutan otonomi khusus, terdapat 150 *Memorandum of Understanding* (MoU) senilai \$ 1,8 miliar USD yang berhasil disepakati. i Narendra Modi juga membuka 324 peluang investasi dan mendorong perusahaan minyak dan gas untuk mencari dan mengeksplorasi minyak dan gas di Kashmir.

Dari dua tinjauan diatas dapat dipahami bahwa tulisan pertama mengambil sudut pandang analisis mengenai pencabutan pemberlakuan

status otonomi khusus Jammu dan Kashmir melalui pendekatan teori *Decision Making* dengan aktor rasional yang berasumsi bahwa *output* politik luar negeri merupakan akibat dari tindakan-tindakan aktor yang rasional. Disisi lain tulisan kedua dengan pendekatan Marxist berpendapat bahwa politik, kekuasaan dan materi terkait erat, sehingga hubungan antara ekonomi dan politik saling mempengaruhi dimana aktor utama adalah kelas sosial. Lebih lanjut, dalam penelitian tersebut, menyebutkan bahwa pencabutan pasal 370 dan 35A didorong oleh kepentingan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi India yang sempat melemah pada era PM India Manmohan Singh. Dari kedua tinjauan tersebut, penulis sendiri mencoba menggunakan konsep Aksi Reaksi untuk menjabarkan Reaksi suatu negara terjadi karena adanya tindakan aksi dari negara lain. Munculnya respon dari Pakistan sebagai bentuk respon atas aksi yang dikeluarkan oleh India melalui pencabutan status otonomi khusus Kashmir, dimana dalam pandangan Pakistan pencabutan tersebut memungkinkan India untuk mengubah susunan demografis wilayah mayoritas muslim (Kashmir), sehingga pada akhirnya direspon oleh Pakistan.

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis menjelaskan respon yang dikeluarkan oleh Pakistan terhadap pencabutan status otonomi khusus Kashmir oleh India. Jenis data yang

digunakan adalah data sekunder yang didapat dari buku atau literatur, situs resmi di internet, artikel dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu pengumpulan data literer yang mengumpulkan bahan-bahan Pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data-data berupa pada pernyataan verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.

RESULT AND ANALYSES

Konflik yang tak kunjung usai di wilayah Kashmir serta terdapat janji politik oleh Partai BJP dan pemerintah lokal Kashmir yang tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kashmir, membuat pemerintah India kemudian mencabut status otonomi khusus Kashmir dalam pasal 370 dan 35A yang selama ini telah diterapkan. Pencabutan status otonomi khusus tersebut, membuat beberapa organisasi internasional dan negara merespon keputusan India tersebut, namun hanya Pakistan satu-satunya aktor negara yang mengeluarkan respon yang cukup berpengaruh kepada hubungan kedua negara.

Pakistan mengeluarkan respon sebagai tanda tidak setuju dengan keputusan India yang mencabut status otonomi khusus Kashmir, karena Pakistan memiliki keinginan untuk menguasai wilayah Kashmir dengan memiliki kepentingan geopolitik serta kepentingan Pakistan untuk menurunkan citra India dimata internasional, hal tersebut terbukti

dengan dibawakannya kasus pencabutan tersebut ke PBB. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pakistan yaitu dengan mengembalikan status otonomi khusus Kashmir. Respon-respon tersebut merupakan reaksi atas aksi India. Berbagai respon tersebut, penulis tuliskan sesuai dengan kurun waktu sebagai berikut:

a. Pengajuan Surat Oleh Pakistan untuk DK-PBB

Pengajuan surat oleh Pakistan dikeluarkan tidak lama setelah munculnya kebijakan pencabutan status khusus Kashmir pada 5 Agustus 2019, penulisan surat kepada PBB dilakukan oleh Shah Mahmood Quereshi yang berisikan meminta PBB untuk melakukan pertemuan guna membahas kebijakan penghapusan status khusus Kashmir dan terkait penertiban agresif yang dilakukan oleh India pasca penghapusan tersebut dengan melakukan penutupan akses komunikasi telepon, internet dan mengirimkan beberapa aparat ke wilayah Kashmir serta melakukan penahanan ke beberapa tokoh setempat dalam tahanan rumah (news.detik.com, 2019). dalam surat itu juga Pakistan menuliskan bahwa PBB memiliki kewajiban untuk mencegah kejadian yang sama pada kasus sebelumnya yaitu Srebrenica dan Rwanda (genosida).

Pada 16 Agustus 2019, pertemuan secara tertutup dilakukan oleh Dewan Keamanan dengan permintaan anggota tetap, Cina. Hasil pada pertemuan tersebut, anggota DK-PBB P5 (Cina, Rusia, Perancis, Amerika Serikat dan Inggris)

hanya Cina yang mendukung Pakistan dalam perselisihan tersebut dan menganggap bahwa keputusan India merupakan pelanggaran terhadap kedaulatannya sendiri. Sementara anggota P5 lainnya, Rusia mendukung penuh keputusan yang dikeluarkan oleh India sementara negara lain hanya menunjukkan kekhawatiran dan ragu untuk mengambil sisi atau keputusan yang jelas dalam konflik tersebut dan kemungkinan besar akan menggunakan hak vetonya untuk mendukung India. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Pakistan dan Cina gagal mendapat suara dari masyarakat internasional (Khalid dan Kriti, 2020).

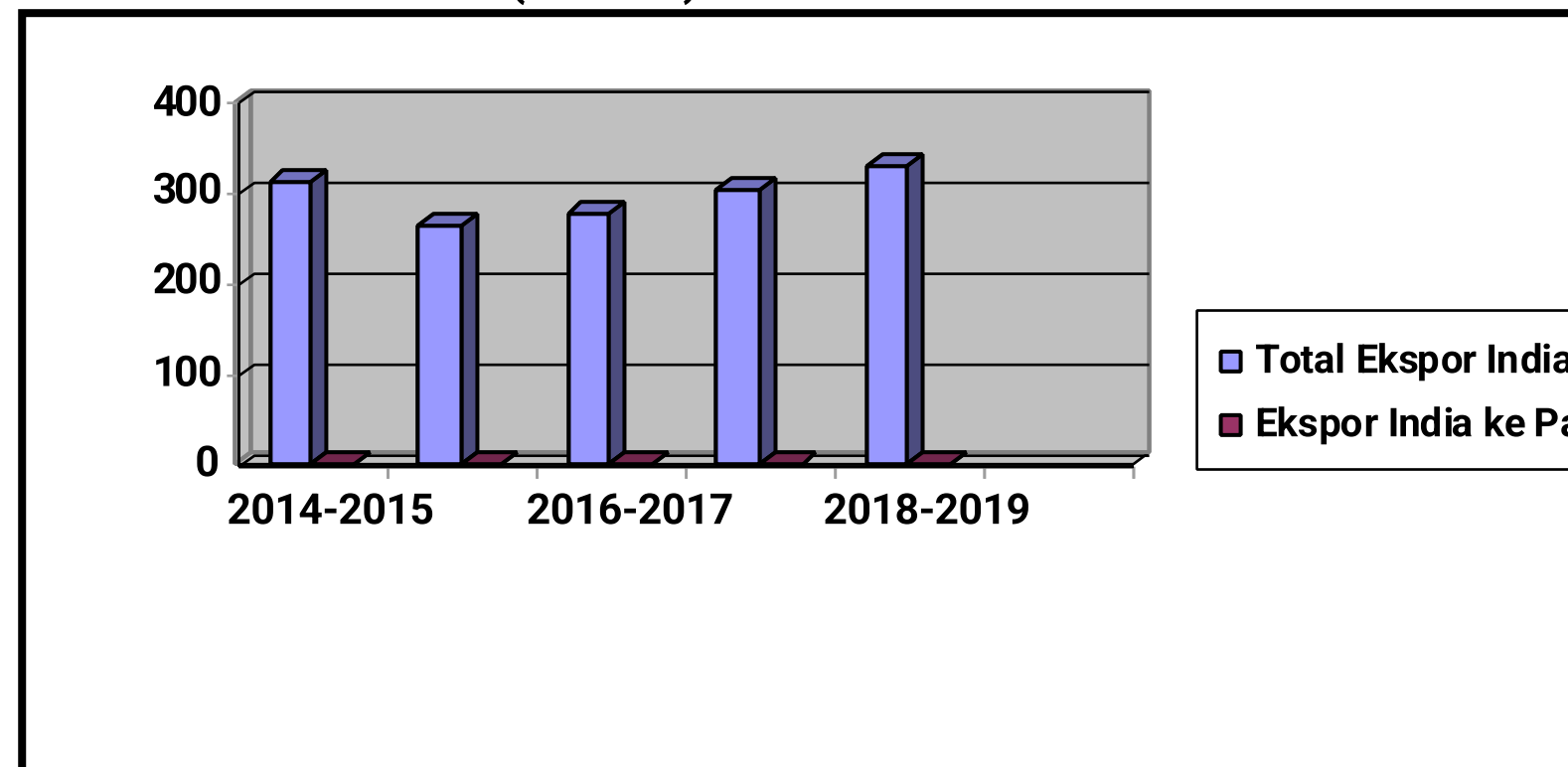
Pada pertemuan tersebut belum membuahkan hasil bagi Pakistan, Sebagian besar anggota tetap P5 memilih untuk abstain. Akhirnya, pada pertemuan tersebut India tetap memegang kewenangan atas urusan dalam negeri mereka dan menandatangani sebuah perjanjian untuk tetap menjaga wilayah Kashmir meskipun status otonominya telah dicabut.

b. Penangguhan Hubungan Perdagangan

Pada 7 Agustus 2019, lewat Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, memutuskan untuk menangguhkan hubungan perdagangan mereka dengan India atas aksi pencabutan status otonomi khusus Kashmir. Sebelumnya, diketahui bahwa, Pakistan berada di urutan bawah dalam daftar hubungan mitra dagang India yaitu di urutan ke-48. Sebaliknya, India menempati peringkat ke-6 dalam daftar hubungan mitra dagang

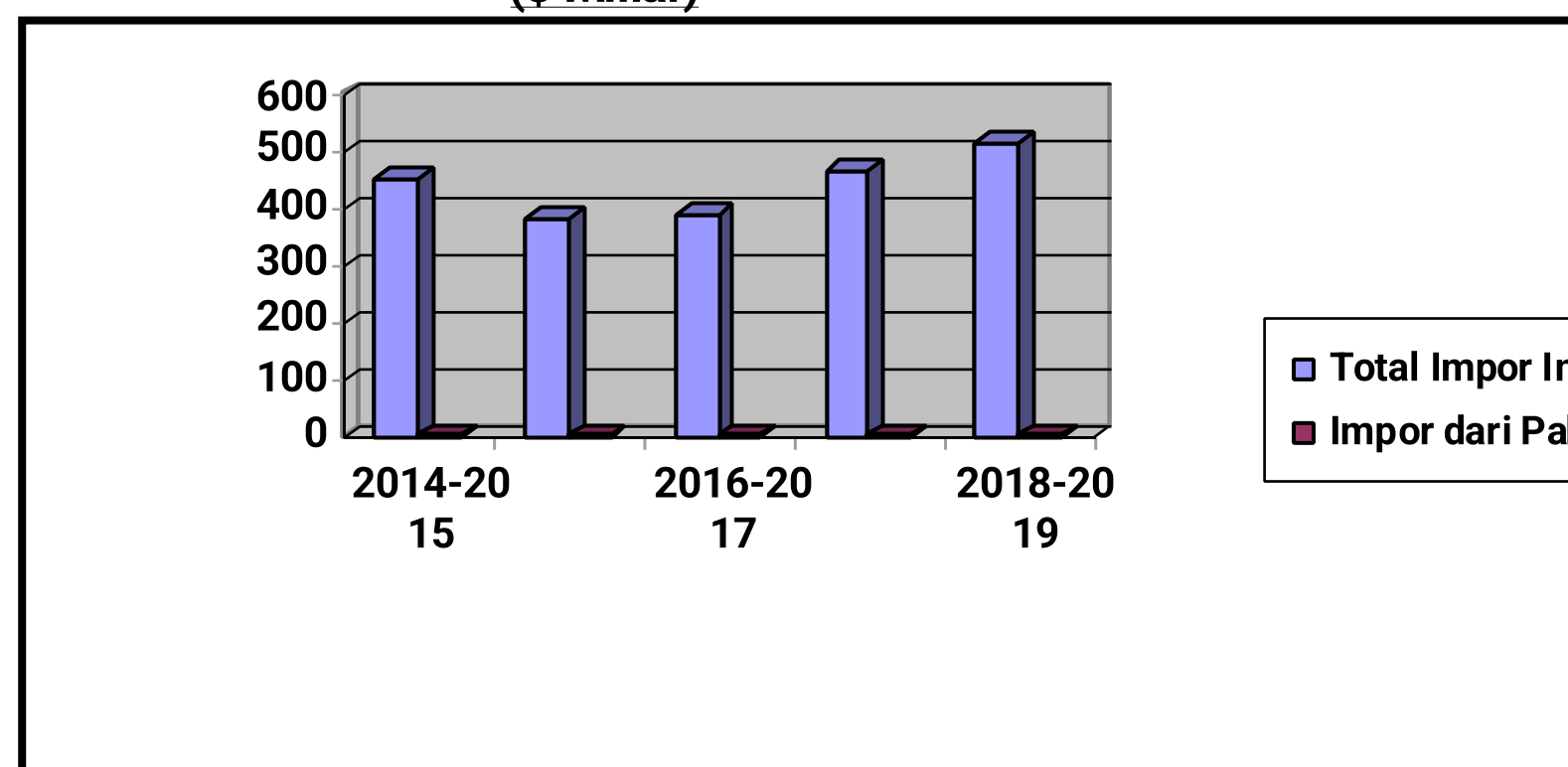
pengimpor utama (survey ekonomi Pakistan pada tahun 2019).

Grafik 1 : Perbandingan Ekspor Perdagangan India dengan Pakistan (\$ Miliar)



Sumber: *Economically ruined Pakistan' s decision to suspend trade makes no dent on India: here' s why* <https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/pakistan-suspend-trade-with-india-370-35a-modi-imran-khan/story/371213.html>

Grafik 2 : Perbandingan Impor Perdagangan India dengan Pakistan (\$ Miliar)



Sumber: *Economically ruined Pakistan' s decision to suspend trade makes no dent on India: here' s why* <https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/pakistan-suspend-trade-with-india-370-35a-modi-imran-khan/story/371213.html>

Tahun 2018 sampai 2019 perdagangan India dan Pakistan hampir 0,1% dari total perdagangan India. Ekspor India ke Pakistan mencapai \$2,06 miliar pada 2018-2019, sementara impornya bernilai \$0,49 miliar. India mengimpor barang-barang seperti bahan bakar

mineral, buah-buahan, garam, belerang, batu kapur, bijih, kulit mentah dan lain-lain.

Sedangkan dari Pakistan, mengekspor kapas, bahan kimia organik, plastik, cat dan mesin ke India.

Pada grafik diatas menunjukkan penurunan, pada ekspor turun sebesar 16%. Tahun 2017, impor naik sebesar 3,05% (\$0,495 miliar), tahun 2018 7,5% (\$0,49 miliar) dan pada tahun 2019, 1,29% (\$0,495 miliar). Total ekspor India dengan Pakistan adalah \$330,08 miliar pada tahun 2018-2019. Perdagangan India dengan Pakistan hanya menyumbang 0,6%. Impor India mencapai \$514,08 miliar pada 2018-2019 menyumbang 0,1% dari total perdagangan pada tahun tersebut. Pakistan memiliki cadangan devisa sebesar \$7,76 miliar, perkiraan *Gross Domestic Product* (GDP) Pakistan turun menjadi 4%, inflasi Pakistan mencapai 8,9% pada Juni 2019.

Penangguhan hubungan perdagangan tersebut akan lebih mempengaruhi Pakistan karena Pakistan sangat bergantung pada India untuk bahan baku industri tekstil dan farmasi. Pada tahun 2018-2019, kapas (\$550,33 juta) dan bahan kimia organik (\$457,75 juta) menyumbang sekitar setengah impor Pakistan dari India. Impor utama Pakistan lainnya dari India tahun 2018-2019 termasuk plastik (\$131,19 juta), *tanning/dyeing extracts* (\$114,48 juta) dan sector nuklir, boiler, mesin dan peralatan mekanik (\$94,88 juta). Setelah penangguhan, impor beberapa produk tersebut turun drastis menjadi \$1 juta hingga \$2 juta antara April 2020 dan Januari 2021, sementara impor kapas berhenti total. Satu-satunya peningkatan

terjadi pada produk farmasi ([IndianEXPRESS, 2021](#)).

Pakistan juga memutuskan untuk melarang pemutaran film India seperti drama, film dan berbagai iklan. Pernyataan tersebut dinyatakan langsung oleh asisten khusus Perdana Menteri bidang Informasi dan Penyiaran, Firdous Ashiq Awan. Pelarangan pemutaran film India ini merupakan kelanjutan dari kasus penyerangan terror bom bunuh diri Pulwama oleh JeM¹, namun pelarangan pemutaran film tersebut berlanjut hingga pencabutan status khusus Kashmir pada Agustus 2019. Keputusan Pakistan untuk melarang pemutaran film India merugikan Pakistan dalam segi perindustrian film di negara mereka sendiri. Pakistan memiliki 120 bioskop, bioskop-bioskop yang ada di Pakistan perlu menayangkan setidaknya 26 film baru setiap tahunnya. Tapi, industri film Pakistan sendiri hanya memproduksi 12 sampai 15 film setiap tahunnya dan tidak dapat menarik banyak penonton. Selain itu sekitar 70% pendapatan film Pakistan diperoleh melalui film-film India. Pelarangan pemutaran film Bollywood tersebut bukan pertama kali, terjadi selama 40 tahun dari 1965 sampai 2005, yang terjadi selama perang dengan India. Hal tersebut membuat industri mengalami kemunduran, beberapa ratus bioskop diseluruh Pakistan diubah menjadi pusat perbelanjaan atau aula pernikahan. Hal tersebut menjelaskan bahwa, Bollywood menyumbang 60% pemutaran film di Pakistan beberapa tahun terakhir ([BBC, 2019](#)).

¹ Pulwama merupakan serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh Jeish e-Mohammad (JEM)

Dengan demikian, respon penanggulangan hubungan perdagangan oleh Pakistan dapat dikatakan tidak efektif, karena memperburuk perdagangan kedua negara karena mengalami penurunan 60% pada ekspor, kemudian dampak negatif sangat dirasakan oleh pihak Pakistan, karena Pakistan sangat ketergantungan pada produk industri tekstil dan farmasi milik India. India tidak terpengaruh terkait keputusan Pakistan menanggihkan hubungan perdagangannya, India akan memertahankan status quo pada penanggulangan hubungan perdagangannya dengan Pakistan. India juga mencabut *Most Favoured Nations* (MFN) untuk Pakistan dan menaikkan bea masuk sebesar 200% (businesstoday.in, 2019). Keputusan Pakistan untuk menghentikan pemutaran film India, juga tidak efektif untuk mengembalikan status otonomi khusus Kashmir, karena *Bollywood* menyumbang 70% pendapatan di Pakistan.

c. Penanggulangan Layanan Kereta Api

Pakistan memutuskan untuk menanggihkan layanan kereta api mereka menuju India pada 8 Agustus 2019. Layanan kereta api yang ditanggihkan oleh Pakistan adalah Samjhauta Express, merupakan layanan kereta api yang membentang antara New Delhi dan Attari di India dan Lahore di Pakistan.

Setelah penanggulangan layanan kereta api Samjhauta Express, pihak dari India juga menanggihkan layanan kereta api mereka yaitu, Thar Express. Thar Express merupakan kereta penumpang internasional yang beroperasi antara Bhagat ki Kothi, yaitu daerah pinggiran

kota Jodhpur di negara bagian Rajasthan India dan Karachi Cantonment di Karachi provinsi Sindh, Pakistan (irfca.org, 2004). Thar Express memfasilitasi masyarakat (penumpang), sedangkan Samjhauta Express membawa barang dan penumpang.

Dampak dari penanggulangan Samjhauta Express dari Pakistan yaitu, mengakibatkan sekitar 117 orang penumpang Pakistan yang menuju India terjebak di perbatasan Wagah (antara Lahore dan Amritsar). Ratusan penumpang kedua negara juga terjebak diperbatasan selama beberapa jam menunggu izin dari pihak keamanan. Kereta juga mengalami gangguan perizinan keamanan yang menghubungkan Delhi dari Lahore. Sekitar 60 penumpang yang seharusnya pergi ke Pakistan dengan naik Samjhauta Express, terjebak di stasiun kereta Attari, 50 penumpang adalah warga negara India dan 10 orang lainnya adalah warga negara Pakistan. yang pada akhirnya, Pakistan meminta India untuk menjemput penumpang berkewarganegaraan India untuk dibawa kembali ke negara mereka (indianexpress.com, 2019), Dampak dari penanggulangan layanan kereta api Thar Express, pemerintah melakukan pembatalan kepada 45 tiket calon penumpang menuju Pakistan.

Setelah enam bulan pasca penanggulangan layanan kereta api, India dan Pakistan masing-masing bergiliran selama enam bulan untuk menggunakan gerbong mereka untuk Samjhauta Express. Gerbong milik Pakistan digunakan pada bulan Januari hingga Juni sedangkan gerbong India digunakan antara bulan Juli sampai Desember.

namun, setelah 5 bulan gerbong milik India diketahui ditahan pihak Pakistan, yang kemudian India meminta Islamabad untuk segera mengembalikan gerbong milik mereka. Sementara itu, hingga tahun 2020 Thar express masih ditangguhkan oleh India ([Financial Express, 2020](#)).

Kebijakan Pakistan dalam menanggguhkan layanan kereta api Samjhauta Express dibalas oleh pihak India dengan menanggguhkan layanan kereta api Thar Express. Kebijakan kedua negara untuk menanggguhkan layanan-layanan kereta api tersebut merugikan masyarakat kedua negara, serta keterhambatan pengiriman barang melalui jalur kereta api. Meskipun telah menanggguhkan layanan kereta api, India masih tetap mempertahankan keputusannya untuk tidak mengembalikan status otonomi khusus Kashmir, dengan demikian kebijakan Pakistan tidak efektif untuk memenuhi tujuan mereka terkait dikembalikannya status khusus Kashmir tersebut.

d. Penurunan Hubungan Diplomatik

Setelah pengumuman aksi India untuk melakukan pencabutan status otonomi khusus Kashmir, Pakistan mengumumkan untuk menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pakistan yaitu, menarik duta besar Pakistan dari India, pelarangan pemutaran film India di Pakistan dan penghentian kegiatan pertukaran budaya. Hal tersebut dikeluarkan Pakistan karena tanda ketidaksetujuan pencabutan status khusus Kashmir.

Pada tanggal 7 Agustus 2019 memutuskan untuk mengusir Komisaris Tinggi India yaitu Ajay Bisara. Lewat Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi mengatakan bahwa Duta besar Pakistan tidak akan lagi berada di India. Pakistan juga mengatakan bahwa mereka tidak akan mengirimkan Komisaris Tinggi ke India ([economictimes.indiatimes.com](#)). Duta besar merupakan perwakilan diplomatik atau perutusan diplomatik yang dikirimkan ke negara lain untuk menyelenggarakan atau melaksanakan hubungan resmi antar negara ([Istanto, 2014](#)). Dengan demikian, keputusan Pakistan dalam menarik duta besarnya dari Pakistan dapat mengakibatkan hubungan kedua negara tidak baik dan dapat mengalami eskalase konflik. Pemulangan pejabat diplomatik tersebut berdampak pula pada hubungan perdagangan kedua negara, tidak lama setelah keputusan Pakistan untuk menarik duta besarnya, Perdana Menteri Imran Khan langsung memutuskan untuk melakukan penangguhan hubungan perdagangan.

Pakistan juga memutuskan untuk menghentikan kegiatan pertukaran budaya dengan India. Menghentikan pertukaran budaya tersebut dengan segala bentuk seperti, film, musik, pendidikan dan ideologi Islam maupun Hindu yang saling mengenalkan ideologi tersebut, karena kedua negara memiliki *background* yang sama secara sejarah dan kedua negara memiliki penduduk Muslim dan Hindu. Hal tersebut kemudian berdampak pada industri musik, dimana musisi atau penyanyi dari Pakistan

maupun India tidak dapat melakukan promosi musiknya di kedua negara, pengenalan kedua ideologi negara juga tidak dapat dilakukan. Para pelajar pun tidak bisa mendapatkan beasiswa di kedua negara, padahal di masing-masing negara memiliki universitas terbaik.

Dengan demikian, aksi berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh India yaitu dengan mencabut status otonomi khusus Kashmir pada 5 Agustus 2019 membuat beberapa negara dan organisasi internasional mengeluarkan reaksi berupa berbagai macam respon seperti menyayangkan kebijakan India dan mendukung kebijakan tersebut. Namun hanya Pakistan, yang berani memberikan reaksi berupa respon-respon atas kebijakan pencabutan tersebut. Tujuan Pakistan mengeluarkan respon tersebut yakni, demi mengembalikan kembali status khusus Kashmir dan munculnya kekhawatiran Pakistan atas posisi Kashmir yang menganggap India berusaha untuk melakukan pembersihan etnis di Kashmir, dimana Kashmir merupakan mayoritas dengan penduduk Muslim, kini dengan hilangnya status otonomi tersebut, penduduk diluar Kashmir dengan bebas membeli tanah dan properti di Kashmir. Namun, respon-respon yang dikeluarkan Pakistan belum berhasil membuat India untuk mengembalikan status otonomi Kashmir, sebagian besar respon yang dikeluarkan oleh Pakistan merugikan negara mereka sendiri.

Reaksi berupa respon yang dikeluarkan sesuai dengan konsep yang peneliti gunakan dimana reaksi mengacu pada beberapa klasifikasi yaitu, *to resist* (menentang aksi) dalam

klasifikasi ini, Pakistan dengan jelas menentang aksi yang dikeluarkan oleh India tentang pencabutan status otonomi khusus Kashmir dengan mengeluarkan beberapa respon sebagai bentuk ketidaksetujuan Pakistan terkait kebijakan pencabutan oleh India dan *to ignore* (mengacuhkan pesan-pesan yang datang dari pihak lawan) dalam hal ini, India selaku negara yang menerima reaksi dari Pakistan tidak terpengaruh terhadap respon-respon yang dikeluarkan oleh Pakistan bahkan dalam keputusan Pakistan untuk menanggihkan hubungan perdagangannya, India memilih untuk mempertahankan status quo dan menaikkan bea masuk sebesar 200%. Selain itu, pada penurunan hubungan diplomatik dimana Pakistan memutuskan untuk memulangkan Komisaris Tinggi India dan membatalkan mengirimkan Komisaris Tinggi Pakistan untuk India, pelarangan pemutaran film India di Pakistan, serta keputusan Pakistan untuk menghentikan pertukaran budaya, India tidak memberikan respon apapun terkait keputusan penurunan hubungan diplomatik oleh Pakistan tersebut.

CONCLUSION

Kebijakan pencabutan status otonomi khusus Kashmir dikeluarkan oleh pemerintah India karena beberapa faktor yaitu kebijakan pencabutan status otonomi khusus Kashmir tersebut sudah lama direncanakan oleh partai *Bhartiya Janata Party* (BJP) yang menilai bahwa Pasal 370 dan 35A diskriminatif terhadap perempuan Kashmir dan masyarakat diluar wilayah Kashmir serta kebijakan reformasi ekonomi yang dibuat oleh Perdana Menteri Narendra Modi dinilai

terhambat karena adanya ketentuan pada Pasal 35A yang tidak bisa dikontrol langsung oleh India. Pakistan kemudian mengeluarkan beberapa respon atas ketidaksetujuannya terhadap kebijakan India tersebut. Tujuan Pakistan mengeluarkan respon ialah untuk mengembalikan status otonomi khusus Kashmir yang telah dicabut oleh pemerintah India serta adanya kekhawatiran Pakistan terhadap masyarakat muslim Kashmir dan menganggap India berusaha melakukan pembersihan etnis terhadap muslim Kashmir. Respon-respon yang dikeluarkan yaitu sebuah pengajuan surat oleh Pakistan untuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK-PBB), penangguhan hubungan perdagangan, penangguhan layanan kereta api, serta penurunan hubungan diplomatik lainnya seperti penarikan dan pemulangan duta besar, pelarangan pemutaran film India

dan penghentian pertukaran budaya. Namun, respon-respon yang dikeluarkan oleh Pakistan tersebut belum cukup membuat Kashmir mendapatkan kembali status otonomi khusus tersebut. Keputusan Pakistan selain membuat hubungan kedua negara kembali tidak harmonis juga membuat Pakistan sendiri merugi.

REFERENCES

References should follow APA reference style. You might refer to our reference guide available in our site. We recommend you to use citation application (eg. Mendeley, Zotero, Refworks, or the Microsoft Words Citation Manager) to help you cite properly. The novelty of the references will be reviewed, normally the majority of the citation is published in last 5 years for the journal articles and last 10 years for book sources. You might use older publications only if it is deemed necessary.